

## SKRIPSI

### HUBUNGAN HUKUM DEBT COLLECTOR DENGAN BANK PENGGUNA JASA DEBT COLLECTOR



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

OLEH :

**VANNY RATIH PUTRI**

030015026

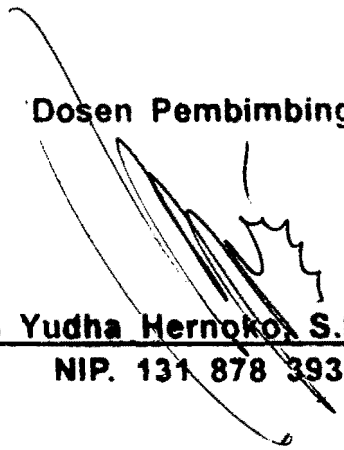
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

# **HUBUNGAN HUKUM DEBT COLLECTOR DENGAN BANK PENGGUNA JASA DEBT COLLECTOR**

## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

  
**Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 878 393**

**Penyusun,**

  
**Vanny Ratih Putri**  
**NIM. 030015026**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Setiap bank memiliki *department* sendiri yang menangani kredit macet, yaitu *collection department*. Bagian inilah yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan *debt collector* untuk menangani debitur macet. Hubungan bank pengguna jasa *debt collector* dengan *debt collector* itu sendiri adalah berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, yaitu kuasa untuk menagih tunggakan debitur yang termasuk dalam kriteria debitur macet. Dalam perjanjian pemberian kuasa ini, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan. Pihak *debt collector* sendiri memberikan surat tugas kepada para *collectornya* untuk melaksanakan kewajibannya terhadap bank.
- b. Dalam perjanjian pemberian kuasa ini, jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau lalai, maka terjadi wanprestasi. Pada kenyataannya pihak bank lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan wanprestasi jika dibandingkan pihak *debt collector*. Ada dua cara yang digunakan para pihak sebagai upaya penyelesaian sengketa diantara mereka, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non

litigasi. Yang lebih sering digunakan adalah jalur non litigasi, melalui negosiasi atau musyawarah.

## **2. Saran**

- a. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyetujui penerbitan kartu kredit, terlebih lagi dalam penggunaannya yang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Sehingga tidak mengalami kesulitan diwaktu yang akan datang, yaitu masuk dalam kriteria debitur macet. Namun jika demikian, masyarakat harus siap menghadapi dan tidak merasa asing dengan orang-orang yang telah diberi kuasa oleh bank untuk menagih tunggakan atas kartu kredit yang telah digunakannya, yaitu para collector.
- b. Bagi pihak bankpun harus lebih selektif dalam mengabulkan permohonan kartu kredit, tidak hanya memikirkan mengejar target pemasukan. Bank harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai konsekuensi dari kartu kredit yang diterbitkan kepada nasabah debitur, bahkan mengenai perhitungan bunga atas setiap tunggakan. Sehingga masyarakat tidak merasa terjebak setelah menggunakan kartu kredit atau ketika macet membayar kartu kredit.